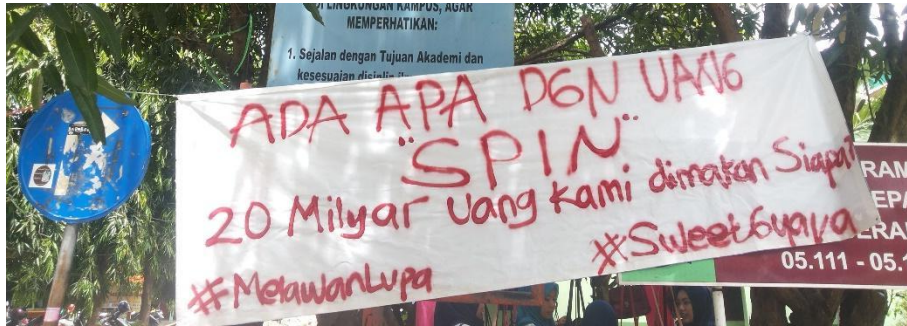


2 Tahun Pemberlakuan SPI di Untirta



Spanduk bukti penolakan adanya SPI (27/04) (TAM)

SERANG – (07/04) Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada tanggal 2 Mei lalu mahasiswa/i Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengadakan aksi di depan gedung rektorat dengan membawa 9 tuntutan yang dinamakan dengan NAWATUMA (Sembilan Tuntutan Mahasiswa). Poin pertama dalam NAWATUMA yang disuarakan yakni menolak SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).

SPI diberlakukan di Untirta sejak tahun 2016. Program tersebut diperuntukan untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Terdapat perbedaan biaya dalam SPI, mahasiswa yang memilih program studi eksak dikenakan biaya minimal 15 juta rupiah sedangkan non eksak biaya minimal sebesar 10 juta rupiah.

Kurnia Nugraha, saat ini menjabat sebagai wakil rektor 2 bagian keuangan, menjelaskan mengenai program SPI yang ada di Untirta.

“SPI merupakan bagian dari PNBPN (penerimaan negara bukan pajak), untuk mahasiswa jalur mandiri. Dimana kita diperbolehkan adanya sumbangan dari calon mahasiswa. Pada tahun 2016 kita melakukan penerimaan jalur mandiri oleh kampus sendiri dengan skema mulai dari nol hingga kemampuan individu sedangkan tahun 2017 kita menggunakan sistem mandiri dengan BKSPN dengan skema yang sudah pasti sehingga pada tahun 2017 untuk yang sosial kena 10 juta dan untuk yang eksak kena 15 juta”, ucapnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan SPI 70 persen untuk fakultas dan 30 persen untuk universitas. Program ini digunakan untuk sarana dan prasarana kampus yang dipersiapkan dalam

rangka persiapan akreditasi program studi. Seperti pembelian alat praktikum dan perbaikan laboratorium.

Namun program SPI ini dianggap memberatkan mahasiswa. Ladiantri Arviani (19) mahasiswi yang masuk melalui jalur mandiri dan membayar uang SPI mengaku masih bingung mengenai program SPI dan meminta transparansi data dari pihak universitas.

“Menurut saya rancu aja gitu, ketika mengeluarkan SPI dari pihak universitas seharusnya mengeluarkan perincian dari SPI itu sendiri. Wajar saja banyak mahasiswa yang memprotes atas uang SPI tersebut, ya karena itu tidak ada perinciannya. Kalau dipikir secara logis uang itu kemana, entah itu untuk pembangunan atau fasilitas. Toh saya tidak dapat fasilitas yang memadai sebagai mahasiswa, di kelas juga pendingin ruangan yang rusak dan tidak diperbaiki jadi tidak kerasa dinginnya”, ujarnya.

Hingga saat ini mahasiswa program studi manajemen tahun 2017 tersebut masih menunggu transparansi data mengenai program SPI yang beberapa waktu ia tanyakan dan dijanjikan oleh pihak universitas.